BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka kesimpulan yang dapat diambil adalah:

1. Pengaturan tentang hibah dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam kerangka otonomi daerah di Indonesia diatur melalui beberapa regulasi dan ketentuan hukum. Antara lain: Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yaitu Undang-undang ini mengatur tentang prinsip-prinsip otonomi daerah, termasuk pengaturan mengenai pembiayaan dan pendanaan. Hibah dari pemerintah pusat merupakan salah satu bentuk transfer keuangan dari pusat ke daerah yang diatur dalam undang-undang ini; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Pemerintah ini memberikan rincian tentang pengelolaan keuangan daerah, termasuk pengaturan tentang hibah. Hibah ini bisa berasal dari pemerintah pusat, antar pemerintah daerah, atau dari pihak ketiga yang tidak mengikat; Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Permendagri ini memberikan panduan teknis lebih lanjut mengenai bagaimana pemerintah daerah mengelola hibah yang diterima dari pemerintah pusat. Termasuk di dalamnya adalah prosedur penerimaan, pencatatan, dan pelaporan

hibah; Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Alokasi Umum (DAU), Selain hibah, dana transfer lainnya seperti DAK dan DAU juga merupakan bentuk dukungan finansial dari pemerintah pusat kepada daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah. Hibah ini diberikan dengan tujuan untuk mendukung kegiatan tertentu yang menjadi prioritas pemerintah pusat tetapi dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Mekanisme, jumlah, dan ketentuan penggunaan hibah diatur secara jelas dalam peraturan-peraturan yang relevan.

2. Hibah dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah memiliki kaitan yang erat dalam pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia. Berikut keterkaitannya, yaitu: Mendukung Kemandirian Daerah, Otonomi daerah memberi kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahannya sendiri. Namun, banyak daerah yang masih membutuhkan dukungan keuangan dari pemerintah pusat untuk menjalankan fungsi dan program yang sesuai dengan kebutuhan lokal. Hibah pusat membantu mengisi kesenjangan keuangan ini dan mendukung kemandirian daerah dalam melaksanakan otonomi; Fleksibilitas dalam Pelaksanaan Program, Hibah dari pemerintah pusat sering kali diberikan untuk program-program tertentu yang mendukung kebijakan nasional tetapi diimplementasikan di tingkat daerah. Ini memungkinkan pemerintah daerah untuk menyesuaikan pelaksanaan program sesuai dengan kondisi lokal, namun tetap selaras dengan tujuan nasional. Dengan demikian, hibah ini memberikan fleksibilitas dalam pelaksanaan otonomi daerah, sambil memastikan keselarasan dengan agenda nasional; Pemerataan Pembangunan, Salah satu tujuan otonomi daerah adalah untuk

mengurangi kesenjangan pembangunan antar daerah. Hibah dari pemerintah pusat memainkan peran penting dalam upaya ini, karena hibah seringkali dialokasikan ke daerah-daerah yang memerlukan dukungan lebih besar untuk meningkatkan infrastruktur, layanan publik, dan kapasitas pemerintahan daerah; Kontrol dan Akuntabilitas, Meskipun hibah diberikan untuk mendukung otonomi daerah, pemerintah pusat tetap memiliki mekanisme kontrol dan akuntabilitas untuk memastikan bahwa dana hibah digunakan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Ini melibatkan pelaporan, evaluasi, dan audit penggunaan hibah oleh pemerintah daerah. Dengan demikian, hibah berfungsi sebagai instrumen untuk menjaga keseimbangan antara otonomi daerah dan kepentingan nasional; Penguatan Kapasitas Daerah, Hibah juga sering kali digunakan untuk meningkatkan kapasitas pemerintah daerah, misalnya melalui pelatihan, pengadaan infrastruktur dasar, atau pengembangan teknologi. Dengan penguatan kapasitas ini, daerah dapat lebih efektif dalam menjalankan fungsi pemerintahan dan memberikan pelayanan kepada masyarakat, yang merupakan inti dari otonomi daerah. Secara keseluruhan, hibah dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah adalah salah satu alat penting untuk mendukung keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah, dengan memberikan dukungan finansial dan teknis yang diperlukan untuk mencapai pembangunan yang merata dan berkelanjutan di seluruh Indonesia.

B. Saran

1. Pasal 295 ayat (2) UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengatur bahwa peraturan daerah (Perda) dapat dibatalkan oleh pemerintah

pusat apabila bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan/atau kesusilaan. Saran untuk implementasi dan penguatan pasal ini: a). Memperkuat mekanisme evaluasi dan pengawasan. Pemerintah pusat harus memiliki prosedur yang jelas dan transparan untuk mengevaluasi Perda yang diterbitkan oleh pemerintah daerah. Libatkan pihak independen, akademisi, atau ahli hukum untuk menilai apakah sebuah Perda bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi. b). Meningkatkan kapasitas pemerintah daerah. Berikan pelatihan dan pendampingan kepada pemerintah daerah dalam proses penyusunan Perda agar sesuai dengan norma hukum yang berlaku. Dorong sinkronisasi regulasi antara pusat dan daerah melalui forum koordinasi regulasi. c). Transparansi dalam pembatalan. Apabila Perda dibatalkan, pemerintah pusat wajib memberikan alasan hukum yang rinci agar menjadi pembelajaran bagi daerah terkait. Sediakan akses publik terhadap dokumen pembatalan dan argumen hukumnya. d). Perbaiki prosedur harmonisasi. Perkuat peran Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dalam proses harmonisasi Perda, terutama melalui evaluasi sebelum Perda diberlakukan. Adakan sistem teknologi informasi yang memungkinkan pemerintah pusat memonitor seluruh Perda yang disahkan. e). Penyelesaian sengketa secara adil. Jika terdapat perselisihan terkait pembatalan Perda, pemerintah daerah diberikan hak untuk mengajukan keberatan melalui mekanisme hukum, seperti Mahkamah Agung. f). Partisipasi publik dalam penyusunan Perda. Dorong keterlibatan masyarakat dalam tahap awal penyusunan Perda agar Perda yang dibuat lebih relevan dengan kebutuhan

masyarakat dan sesuai dengan hukum nasional. g). Sanksi tegas untuk penyalahgunaan kewenangan. Terapkan sanksi administratif atau pidana terhadap oknum pemerintah daerah yang menyusun Perda dengan sengaja melanggar aturan yang lebih tinggi atau untuk kepentingan tertentu. Dengan penguatan mekanisme tersebut, Pasal 295 ayat (2) dapat lebih efektif diterapkan untuk menjaga konsistensi hukum, kepastian hukum, dan keseimbangan antara kewenangan pusat dan daerah.

2. Diharapkan kepada pemerintahan daerah agar menjaga hubungan dengan pemerintah pusat karena hal ini yang sangat penting dalam menjalankan pemerintahan di Indonesia. Penting untuk memperkuat koordinasi dan komunikasi antara kedua entitas ini guna mencapai tujuan pemerintahan yang lebih baik. Pemerintah daerah perlu aktif dalam menyampaikan aspirasi dan masalah yang dihadapi kepada pemerintah pusat, sementara pemerintah pusat perlu memberikan dukungan dan bimbingan kepada pemerintah daerah dalam melaksanakan kebijakan. Dengan adanya kerjasama yang baik antara daerah dan pemerintah pusat, diharapkan pembangunan di Indonesia dapat berjalan dengan lebih baik dan merata.